

BAB I

PENDAHULUAN

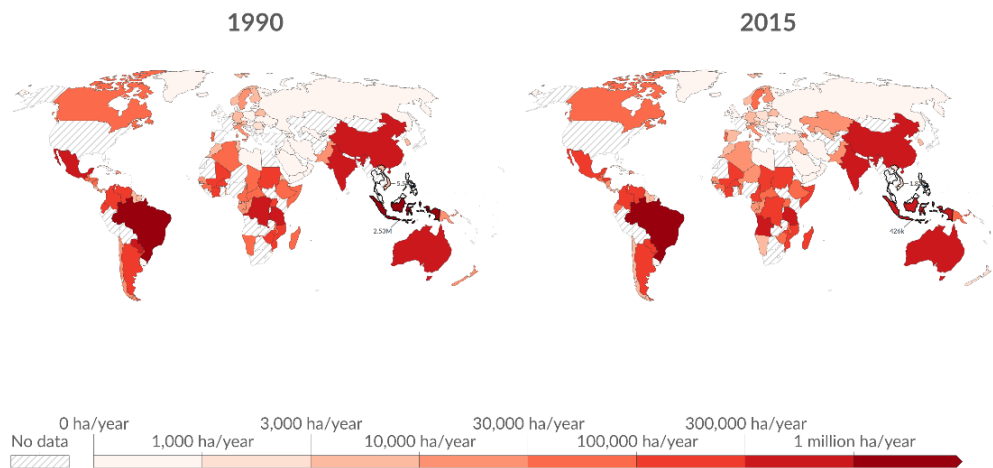
1.1 Latar Belakang

Di tengah upaya global mencapai pembangunan berkelanjutan, negara-negara di dunia sedang mengalami dilema dalam menyeimbangkan antara mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari titik kritis ekologis. Dilema ini semakin nyata dirasakan oleh negara-negara berkembang, di mana pembangunan ekonominya masih bertumpu pada sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus dan tidak diimbangi tata kelola yang tepat sering kali menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem lingkungan. Ketidakseimbangan antara dorongan ekonomi dan kapasitas lingkungan inilah yang memicu munculnya berbagai bentuk krisis ekologis di tingkat global, salah satunya seperti meningkatnya laju deforestasi.

Deforestasi merupakan penggundulan hutan secara permanen yang disebabkan aktivitas manusia untuk mengubah fungsi lahan menjadi penggunaan lain atau non-hutan seperti perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan pertambangan. *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (2025) melaporkan bahwa ekosistem hutan menghadapi tantangan deforestasi sebesar 10,9 juta hektar per tahun dalam 10 tahun terakhir (2015-2025). Meskipun angka tersebut menunjukkan perlambatan jika

dibandingkan dengan tingkat deforestasi pada periode 1990-2000 yaitu 17,6 juta hektar per tahun, laju deforestasi masih tetap menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan global. Terlebih sebagian besar deforestasi terjadi di kawasan yang memiliki peran ekologis strategis terhadap keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati. Apabila terjadi secara terus menerus ini tidak hanya sekedar penurunan keanekaragaman hayati saja, tetapi juga akan memperburuk krisis iklim, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat terutama yang berada di kawasan tropis.

Gambar 1.1. Peta Deforestasi Tahunan, Periode 1990 dan 2015



Sumber: Peta Deforestasi Tahunan, Periode 1990 dan 2015. (*Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2025*)

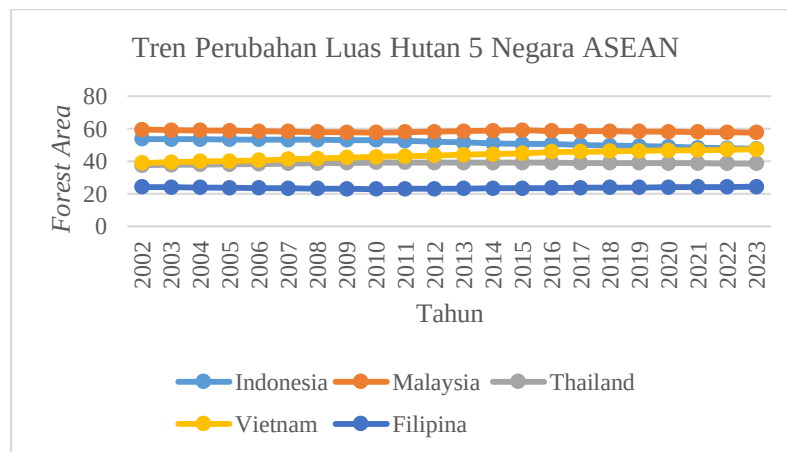
Selain dampak ekologis, deforestasi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang bersifat multidimensi. Dalam konteks deforestasi dampak ekologis memang tidak luput dari sorotan, padahal disamping itu terdapat hal yang sama penting dan saling berkaitan untuk diperhatikan yaitu dari segi ekonomi. Perlu disadari, hutan adalah aset ekonomi dan sosial yang mendasar

bagi keberlanjutan hidup manusia. Melalui fungsi ekologisnya, hutan berperan banyak dalam menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti penyimpanan karbon, pengatur situs hidrologi, pelindung kesuburan tanah, serta habitat keanekaragaman hayati yang menopang produktivitas di sektor pertanian, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Jasa ekosistem hutan ini jika ditotal nilainya mencapai 50 hingga 150 triliun US\$ atau lebih dari sepuluh kali lipat nilai seluruh emas yang pernah ditambang di dunia termasuk dengan cadangannya (Kappen *et al.*, 2020). Nilai tersebut menegaskan bahwa hutan adalah aset ekonomi serta lingkungan terpenting dan jauh lebih berharga sebagai aset aman untuk keberlanjutan pembangunan dibandingkan emas. Karena nilainya yang sangat tinggi ancaman kehancuran hutan (deforestasi) dapat menyebabkan kerugian ekonomi global (penurunan GDP) sebesar \$2,7 triliun per tahun (Bank, 2021).

Fenomena deforestasi yang berdampak luas tersebut juga tercermin di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, namun juga sebagai pusat penyumbang deforestasi terbanyak kedua setelah Amerika Latin. Dunia telah kehilangan enam juta hektar hutan disetiap tahunnya akibat deforestasi dan ASEAN menjadi kawasan yang menyumbang 28% dari total angka tersebut (Ritchie, 2021). Negara-negara penyumbang deforestasi secara signifikan di kawasan ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina (Asia, 2022; Earth, 2023). Berdasarkan data *World Bank* juga dapat dilihat bahwa proporsi luas hutan (*forest area*) terhadap

total wilayah daratan di sejumlah negara ASEAN mengalami penurunan presentase dari tahun ke tahun. Penurunan ini menandakan adanya deforestasi yang terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konversi lahan. Meskipun pola dan tingkat penurunannya berbeda antarnegara, namun kecenderungan umum yang terlihat yaitu berkurangnya kapasitas ekosistem hutan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi kawasan. Berikut tren perubahan luas hutan di lima negara tersebut dari tahun 2002 hingga 2023:

Grafik 1.1. Tren Perubahan Luas Hutan 5 Negara di kawasan ASEAN



Sumber: Tren Perubahan Luas Hutan 5 Negara ASEAN. Diolah dari *World Bank, Forest Area (2025)*

Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor utama deforestasi di ASEAN erat kaitannya dengan model pembangunan ekonomi dan struktur kelembagaan tingkat nasional. Faktor-faktor tersebut meliputi ekspansi lahan pertanian khususnya untuk produksi kelapa sawit, karet, dan komoditas pangan, kegiatan pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya permintaan global terhadap bahan baku industri turut memperkuat tekanan terhadap

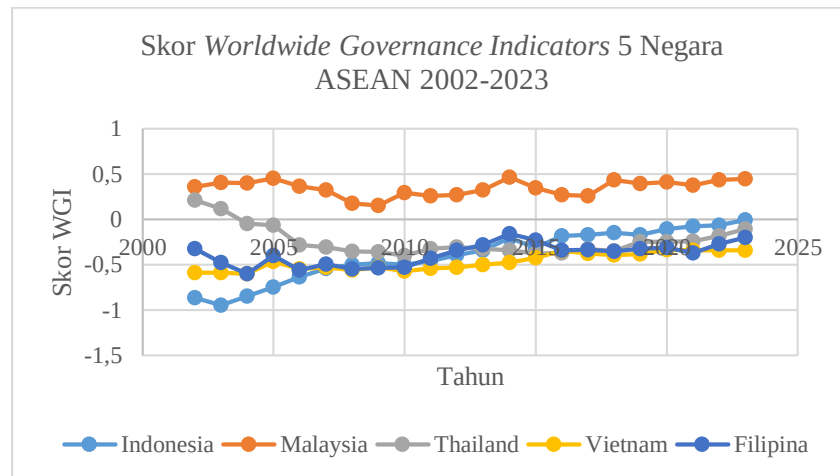
kawasan hutan tropis (Asia, 2022). Di samping itu, efektivitas tata kelola pemerintahan dan penegakan regulasi juga berperan dalam menentukan sejauh mana tekanan ekonomi dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan seperti deforestasi.

Dinamika penurunan luas hutan dan faktor-faktor penyebab deforestasi tidak terjadi secara seragam di seluruh negara ASEAN. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam, arah kebijakan pembangunan, serta kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi penyebab variasi pola dan intensitas deforestasi antarnegara. Meskipun dalam konteks tantangan lingkungan di kawasan ASEAN serupa. Namun masing-masing negara memiliki respon yang berbeda terhadap tekanan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, diperlukan analisis yang berfokus pada negara-negara dengan karakteristik tertentu untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi secara komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada lima negara berkembang di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pemilihan lima negara ini berdasarkan pertimbangan empiris dan konseptual. Pertama, karena negara-negara tersebut memiliki kecenderungan penurunan luas hutan yang relatif konsisten selama dua dekade terakhir, meskipun dengan tingkat dan pola yang berbeda. Kedua, pertumbuhan ekonomi di lima negara relatif cepat, yang mencerminkan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur produksi

intensitasnya meningkat. Ketiga, berdasarkan indikator tata kelola dunia atau *Worldwide Governance Indicators* (WGI), nilai tata kelola pemerintahannya masih berada di bawah +1, yang megindikasikan masih adanya tantangan dalam tata kelola pemerintahan.

Grafik 1.2. Skor *Worldwide Governance Indicators* di Lima Negara ASEAN Tahun 2002-2023



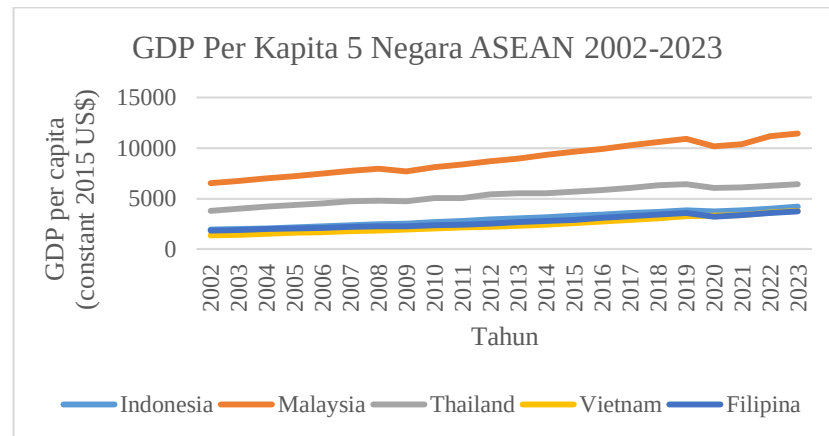
Sumber: Skor *Worldwide Governance Indicators* 5 Negara ASEAN 2002-2023. Diolah dari *World Bank* (2025)

Agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai deforestasi, maka akan diuraikan kondisi pada setiap negara ASEAN yang menjadi objek penelitian. Titik awal pembahasan tersebut dimulai dari Indonesia, yaitu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di Asia Tenggara, serta negara yang berperan strategis dalam perekonomian regional. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam dua dekade terakhir terpantau relatif stabil. Stabilitas ini beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan perubahan penggunaan lahan. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai contoh penting dalam melihat bagaimana tekanan

pembangunan ekonomi dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya hutan, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Malaysia, negara yang memiliki hutan tropis terluas setelah Indonesia, menunjukkan karakteristik yang sedikit berbeda. Ditunjukkan pada gambar 1.3, tingkat pendapatan per kapitanya relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia, Thailand, Vietnam, serta Filipina. Nilai GDP per kapita tersebut sebesar 11.445 US\$ (*constant* 2015 US\$) pada tahun 2023 (Bank, 2025). Namun nilai tinggi tersebut bukanlah jaminan, Malaysia masih menghadapi tekanan deforestasi akibat ekspansi perkebunan dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Dinamika ini seolah mencerminkan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi tidak secara otomatis mengurangi tekanan terhadap lingkungan apabila tidak diiringi dengan tata kelola yang kuat.

Grafik 1.3. *Gross Domestic Product Per Kapita (constant 2015 US\$) di Lima Negara ASEAN 2002-2023*



Sumber: GDP Per Kapita (*constant* 2015 US\$) 5 Negara ASEAN 2002-2023. Diolah dari World Bank (2025b)

Thailand dan Vietnam, hutan yang dimiliki dua negara ini mengalami transformasi struktural yang pesat, ditandai dengan pergeseran dari basis ekonomi pertanian menuju ekonomi industri dan jasa. Transformasi ini berlangsung seiring dengan meningkatnya integrasi kedua negara ke dalam lingkup pasar global, yang tercermin dalam tingkat *trade openness* yang relatif tinggi. Menurut data *world bank* yang dirangkum oleh *The Global Economy.com* (2025), nilai *trade openness* Thailand dan Vietnam termasuk diantara negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat keterbukaan perdagangan tinggi seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Vietnam mencatat rasio ekspor dan impor terhadap *Gross Domestic Product* sekitar 164,82% pada 2023 dan Thailand sekitar 128,82% pada periode yang sama. Keterbukaan perdagangan seperti ini memiliki implikasi ganda terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan. Di satu sisi, perdagangan yang lebih terbuka dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, investasi asing, dan integrasi ke rantai nilai global, sebagaimana ditunjukkan dalam literatur yang membahas dampak *trade openness* terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN (Nguyen, 2021). Namun, di sisi lain peningkatan kegiatan perdagangan sering kali berkaitan dengan ekspansi sektor berbasis sumber daya alam dan penggunaan lahan intensif, termasuk pembukaan lahan untuk produksi ekspor yang dapat mempercepat laju deforestasi. Akan lebih kompleks lagi ketika kapasitas kelembagaan dan kualitas kebijakan lingkungan belum sepenuhnya matang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan.

Sementara itu, negara dengan julukan Mutiara dari Lautan Pasifik yaitu Filipina menghadapi tantangan deforestasi yang dipengaruhi oleh kombinasi pertumbuhan penduduk, pembangunan wilayah, serta keterbatasan kapasitas tata kelola lingkungan. Diantara lima negara yang menjadi objek penelitian, secara empiris Filipina memang memiliki luas kawasan hutan yang relatif kecil. Hal ini bisa menjadi pertanda adanya kemungkinan terjadinya laju deforestasi historis yang tinggi dalam jangka panjang. Situasi demikian menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan menjadi semakin signifikan, meskipun kontribusi ekonomi dari sektor berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional kecil. Dengan basis hutan yang terbatas, aktivitas pembangunan dan perubahan penggunaan lahan yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih profesional, sehingga menempatkan Filipina pada posisi yang rentan dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

Merujuk pada data serta konteks latar belakang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina menunjukkan kecenderungan penurunan luas hutan seiring dengan pertumbuhan ekonominya, akan tetapi hubungan antara kedua fenomena tersebut belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara konsisten dalam literatur empiris. Secara teoritis, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, sering dijelaskan melalui hipotesis *Environmental Kuznets Curve* (EKC), yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan umumnya mengalami peningkatan pada fase awal

pembangunan dan akan menurun setelah tingkat pendapatan tertentu (titik balik pendapatan) tercapai. Namun demikian, beberapa studi empiris yang menguji penerapan kurva lingkungan Kuznet (EKC) dengan indikator deforestasi masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konklusif, khususnya di negara-negara berkembang.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi oleh pengurangan tingkat deforestasi, bahkan pada sejumlah kasus membentuk hubungan nonlinier berbentuk U. Dalam artian ditahap awal tingkat deforestasi tinggi dan sempat menurun seiring pertumbuhan ekonomi, sebelum akhirnya meningkat kembali saat tingkat pendapatan negara lebih tinggi. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita di fase tertentu kembali mendorong tekanan terhadap sumber daya hutan akibat ekspansi aktivitas ekonomi berbasis lahan dan sumber daya alam. Hubungan *U-shaped* antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi sering ditemukan di berbagai penelitian, seperti salah satunya penelitian Gil-p, Pablo-romero dan Antonio (2023) yang menemukan bentuk kurva U pada pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di Amerika Latin.

Ketidakselarasan temuan tersebut mengindikasikan perlu dilakukannya pengkajian kembali hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang relevan. Terutama bagi negara-negara berkembang di kawasan ASEAN yang dimana tingkat pertumbuhan ekonominya masih sangat bergantung pada sumber daya alam.

Lebih detailnya, apabila meninjau kembali karakteristik lima negara, perdagangan internasional dan tata kelola pemerintahan juga disinyalir memainkan peran krusial dalam hubungan ini. Sehingga diperlukan juga pemahaman empiris yang memadai mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi memengaruhi deforestasi. Karena tanpa pemahaman kebijakan pembangunan berisiko memperparah degradasi lingkungan dan menciptakan biaya sosial serta ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.

Kualitas tata kelola pemerintahan memainkan peran strategis dalam menentukan arah dan dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Tata kelola yang efektif dapat memperkuat implementasi kebijakan lingkungan, meningkatkan penegakan hukum, serta mengarahkan aktivitas ekonomi agar lebih ramah terhadap sumber daya alam. Sementara kelemahan institusional berpotensi memperbesar tekanan pembangunan terhadap kawasan hutan meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Oleh karena itu tata kelola pemerintahan dipandang tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi.

Berbeda halnya dengan keterbukaan perdagangan internasional dalam konteks ini berperan sebagai faktor pendukung yang turut memengaruhi dinamika deforestasi melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas berbasis sumber daya alam. Intergrasi yang semakin kuat ke dalam pasar global berpotensi mendorong ekspansi aktivitas produksi dan perubahan penggunaan

lahan, khususnya di negara berkembang. Sehingga dalam penelitian ini perdagangan penting untuk diperhitungkan dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi, agar pemahaman yang diperoleh tidak mengabaikan pengaruh eksternal yang menyertai proses pembangunan ekonomi.

Selaras dengan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Deforestasi Negara ASEAN dengan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Variabel Moderasi dalam Perspektif *Environmental Kuznets Curve*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memengaruhi deforestasi, serta untuk mengetahui apakah kualitas tata kelola pemerintahan memiliki peran sebagai faktor yang memperkuat atau justru memperlemah hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap deforestasi di lima negara ASEAN. Negara tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang ekonomi lingkungan dan memberikan referensi bagi perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian yang berjudul “Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Deforestasi Negara ASEAN dengan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Variabel Moderasi dalam Perspektif *Environmental Kuznets Curve*”, terlihat bahwa interaksi antara pertumbuhan

ekonomi dan deforestasi di negara-negara berkembang kawasan ASEAN masih menunjukkan dinamika yang kompleks dan belum sepenuhnya jelas. Pertumbuhan ekonomi disuatu negara berkembang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun proses pembangunan yang banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga diduga memengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap deforestasi. Agar analisis yang dilakukan mampu menggambarkan hubungan tersebut secara lebih komprehensif, faktor-faktor yang menyertai proses pembangunan seperti keterbukaan perdagangan internasional juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, rumusan masalah disajikan dalam susunan berikut:

1. Apakah *Gross Domestic Product* per kapita berpengaruh terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN?
2. Apakah kuadrat *Gross Domestic Product* per kapita berpengaruh terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN?
3. Apakah keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN?
4. Apakah tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN?

5. Apakah tata kelola pemerintahan berperan memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap deforestasi di lima negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berasal dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh GDP per kapita terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN.
2. Mengetahui pengaruh kuadrat GDP per kapita terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN.
3. Mengetahui pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN.
4. Mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN.
5. Mengetahui peran tata kelola pemerintahan dalam memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap deforestasi di lima negara ASEAN.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan penelitian ini difokuskan pada kajian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi dalam perspektif *Environmental Kuznets Curve*. Hal ini bertujuan untuk menjaga fokus analisis agar tetap terarah, terukur, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Objek dalam penelitian meliputi lima negara berkembang di kawasan ASEAN yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pemilihan kelima negara tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik yaitu sebagai negara berkembang yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, disertai dengan perubahan luas hutan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, negara-negara tersebut juga menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya alam serta tata kelola pemerintahan, sehingga relevan untuk dijelaskan dalam konteks hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di kawasan ASEAN.

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup analisis berbasis data sekunder berbentuk panel tahunan periode 2002-2023, dengan mempertimbangkan ketersediaan serta konsistensi data antarnegara. Pendekatan data panel ini dipilih karena keunggulannya yang mengamati variasi antarnegara dan perubahan anatarwaktu secara bersamaan, sehingga memberikan gambaran terkait dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di kawasan yang diteliti.

Adapun variabel yang digunakan meliputi, deforestasi sebagai variabel dependen yang diproksikan melalui perubahan luas hutan, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen utama yang diukur menggunakan *Gross Domestic Product* per kapita. Studi ini juga mempertimbangkan bentuk kuadrat dari variabel pertumbuhan ekonomi untuk menguji pola hubungan dalam kerangka *Environmental Kuznets Curve*. Selain itu, kualitas tata kelola

pemerintahan digunakan sebagai faktor kelembagaan yang diperhatikan dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi, mengingat peran institusi dalam mengarahkan dan mengendalikan dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Faktor-faktor lain yang relevan dengan dinamika pembangunan, seperti keterbukaan perdagangan internasional, ikut diperhitungkan guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif.

Perilaku ini tidak mencakup pembahasan pada tingkat mikro, seperti rumah tangga, perusahaan, atau kebijakan kehutanan secara sektoral dan wilayah spesifik. Fokus penelitian diarahkan analisis pada makro untuk memperoleh pemahaman umum mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di negara-negara berkembang kawasan ASEAN, serta peran faktor kelembagaan dalam konteks pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan literatur ekonomi lingkungan, khususnya terkait analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap deforestasi dalam kerangka *Environmental Kuznets Curve* (EKC). Dengan menjadikan perubahan luas hutan sebagai indikator deforestasi, penelitian ini membantu memperkaya pemahaman kontribusi empiris mengenai variasi pola hubungan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan yang tidak selalu

mengikuti bentuk U terbalik sebagaimana diasumsikan dalam hipotesis EKC. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian mengenai peran tata kelola pemerintahan, dalam memengaruhi dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi di negara-negara berkembang. Temuan ini juga dapat menjadi referensi akademik kajian berikutnya yang mengangkat isu serupa melalui pendekatan lintas negara dan data panel.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya kepada instansi pemerintah, masyarakat, serta kalangan akademisi. Bagi instansi pemerintah dan pembuat kebijakan yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan, kehutanan, dan lingkungan hidup, peneliti berharap mampu menjadi sumber informasi empiris dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih memperhatikan kelanjutan. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa membantu meningkatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara aktivitas ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan keberlanjutan sumber daya hutan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan studi ekonomi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hubungan pertumbuhan ekonomi dan deforestasi dalam perspektif *Environmental Kuznets Curve*, bagi mahasiswa dan kalangan akademisi.